**PEREMPUAN DALAM KAJIAN KOMUNIKASI**

**POLITIK DAN GENDER (K3)**

*Secara kuantitas perempuan terbesar jumlah pemberian*

*suaranya dalam pemilihan umum. Sehingga tuntutan peran*

*dan partisipasi perempuan tidak hanya sekedar memilih.*

*Perempuan mempunyai hak untuk menduduki jabatanjabatan*

*strategis dalam bidang politik. Dalam membangun*

*komunikasi politik, perempuan baik secara individu maupun*

*kelompok memiliki alasan-alasan, implikasi dan peran yang*

*memunculkan perannya di partai politik dan legislatif. Melalui*

*komunikasi yang dibangun oleh kaum perempuan tersebut*

*dengan masuk pada sistem politik seperti partai politik*

*ataupun lembaga legislatif, mereka akan menempati posisi*

*atau jabatan-jabatan strategis di dalamnya. Keberadaan*

*perempuan tersebut dapatlah ditelaah melalui kajian*

*komunikasi politik dan gender baik dalam bingkai konsep*

*maupun tataran praktisnya.*

**Kata Kunci**: Perempuan, Komunikasi Politik, dan Gender

**A. Pendahuluan**

Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan

dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya *“image”* yang

tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa

politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan

dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah perempuan yang

terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat

demokrasinya dan persamaan hak asasinya cukup tinggi. Selain itu,

kesan semacam itu muncul karena secara historis, khususnya pada

tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan

“lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah, sementara perempuan

bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti

memasak, mengasuh anak, dan melayani suami.

Masih belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender ini

bisa dibaca pada realitas partisipasi perempuan dalam jabatan-jabatan

publik di dunia internasional yang ternyata masih sangat minim

dan begitu memprihatinkan. Hal ini ditandai dari 418 partai politik

di 86 negara, perempuan yang menduduki posisi sebagai presiden/

ketua partai hanya 10,8%, deputi presiden/wakil ketua 18,7%,

sekretaris jenderal 7,6%, juru bicara partai 9%2. Menurut sensus yang

2 *Lihat*, Website Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2000. *Baca* juga,

Soetjipto AW. “Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik”. Dalam Smita

Notosusanto dan Purwandari EK (Peny). *Perempunan Pemberdayaan.* Jakarta: Program

Studi Kajian Wanita UI. 1997. hlm. 3. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya

meneliti tentang masuknya perempuan ke sektor politik adalah untuk mengetahui

lebih jauh apakah terjadi perluasan *scope* politik ke arah masalah-masalah yang

semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan

terhadap reproduksi perempuan dan sebagainya. Kehidupan politik barangkali akan

lebih bermoral; karena perempuan lebih mementingkan *“conventional politics”*

Dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS)3 tahun 2000, jumlah

perempuan di Indonesia adalah 101.625.816 jiwa atau 51 persen

dari seluruh populasi atau lebih banyak dari total jumlah penduduk

di ketiga negara Malaysia, Singapura dan Filipina. Namun demikian,

jumlah yang besar tersebut tidak tampak dalam jumlah keterwakilan

perempuan di lembaga-lembaga pembuat/pengambil keputusan

politik di Indonesia.

Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003

tentang Pemilihan Umum4, dapat dikatakan bahwa perjuangan kaum

perempuan untuk mendapatkan hak khusus di bidang politik yang

sifatnya sementara (*affirmative action*) telah tercapai. Pada satu sisi

kebijakan ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi kaum

perempuan di Indonesia, sebab dengan kebijakan amandemen

Undang-undang tersebut, perempuan dapat meningkatkan partisipasi

politiknya yang terlihat dalam peningkatan representasi

perempuan di parlemen sekurang-kuangnya 30 persen. Hal ini tercermin

secara implicit pada Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap

partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan anggota

DPR/DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah

pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya

30 persen”. Namun pada sisi yang lain, justru akan menjadi kendala

bagi perempuan itu sendiri, institusi-institusi yang akan mereka

tempati manakala kesiapan dan penerapannya tidak sejalan dengan

tuntutan dari keijakan Undang-undang tersebut.

Menurut Tari Siwi Utami5, upaya maksimal pemberdayaan

perempuan semacam itu menunjukkan adanya *political will* dari

pemerintah yang apresiatif terhadap perkembangan pengarusutamaan

gender dalam pergulatan politik nasional. Hal ini bisa dilihat

sebagai perkembangan yang cukup menggembirakan bagi aktivis

perempuan yamng *concern* terhadap pengarusutamaan gender

seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan sosial

daripada *“hard politics”* seperti *arm race,* perang, senjata nuklir dan sebagainya

dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fakta menunjukkan

bahwa selama Orde Baru pemberdayaan perempuan ini diwarnai

dengan pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan

serta seluruh organisasi independen lainnya. Bercokolnya lembaga

Dharma Wanita atau PKK yang mengkoordinir karya perempuan pada

masa orde baru menjadi saksi adanya kooptasi rezim orde baru dalam

melanggengkan domestifikasi perempuan.

Ada masalah yang sangat strategis untuk dikaji lebih jauh,

yaitu mengenai peran perempuan dalam komunikasi politik beserta

segala kendala dan faktor pendukung keterlibatan mereka. Hal ini

sangat penting diteliti karena dalam perspektif politik modern, logikanya,

agenda yang kongkrit untuk memajukan peran dan harkat

perempuan Indonesia sudah selayaknya dijadikan salah satu tawaran

utama oleh partai politik yang ingin melapangkan jalannya ke gedung

parlemen. Hal ini didasari oleh fenomena bahwa 57% perolehan suara

ditentukan oleh suara perempuan6. Alasan lain yang tidak kalah

pentingnya meneliti tentang masuknya perempuan ke sektor politik

adalah untuk mengetahui lebih jauh apakah terjadi perluasan

cakupan politik ke arah masalah-masalah yang semula dianggap

bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap

reproduksi perempuan dan sebagainya.7 Bahkan lebih jauh dari itu,

karena setengah total jumlah penduduk di Indonesia adalah perempuan,

maka mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan

keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas

penduduk Indonesia dari proses politik.

**B. Perempuan dalam Kajian Gender**

**1. Konsep Gender**

Gender diartikan sebagai konstruksi sosio-kultural yang

membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender berbeda

dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan wanita yang bersifat

biologis.8 Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat

dengan gender maskulin dan jenis kelamin wanita berhubungan

dengan gender feminin. Kaitan antara jenis kelamin dengan gender

bukanlah merupakan korelasi absolut. Secara teoretik, terdapat tiga

definisi mengenai gender yang kami cantumkan di sini, sebagai

rujukan. Pertama, gender adalah pembedaan peran, identitas, serta

hubungan antara perempuan dan lelaki yang merupakan hasil

bentukan masyarakat.9 Kedua, gender adalah seperangkat harapan,

keyakinan, dan stereotip yang seharusnya dilakukan oleh seorang

individu, laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sosial mereka.10

Ketiga, gender adalah seperangkat peran, seperti halnya kostum dan

topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita

adalah feminin atau maskulin”.11

Ketidakseimbangan berdasarkan gender mengacu pada

ketidak seimbangan akses ke sumber-sumber penting, yang meliputi

kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain,

prestise, peranan yang menentukan, waktu yang leluasa, kesempatan

memperoleh pendidikan dan pelatihan serta kebebasan dari paksaan

atau siksaan fisik.12 Perbedaan gender (*gender differences*) antara

laki-laki dan perempuan berlangsung terus menerus dalam sejarah

yang sangat panjang dan kompleks hingga sekarang. Ia dibentuk,

disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial

hingga banyak yang dianggap sebagai ketentuan Tuhan (seolah-olah

bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi), sehingga perbedaan

gender dianggap dan dipahami sebagai sebuah kodrat.13

**2. Perspektif Teori Gender**

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan

mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial, budaya,

ekonomi dan bahkan politik. Persepsi yang seolah-olah mengendap

di alam bawah sadar ialah jika seseorang mempunyai atribut biologis,

seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan,

maka itu juga menjadi atribut gender yang bersangkutan dan selanjutnya

akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat.14

Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan

relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran, dan status di dalam

masyarakat.

Teori psikoanalisa beranggapan bahwa peran dan relasi gender

ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual,

terutama dalam masa *phallic stage,* yaitu suatu masa ketika seorang

anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin

yang dimiliki masing-masing. Rasa rendah diri seorang anak

perempuan mulai muncul ketika dirinya menentukan “sesuatu’ yang

kurang, yang oleh Freud diistilahkan dengan “kecemburuan alat

kelamin” (*penis envy*). Jadi jelas bahwa unsur biologis merupakan

faktor dominan (*determinant factor*) di dalam menentukan pola

perilaku seseorang. Teori ini terkesan terlalu sexis karena menafikan

faktor ekologi dan lingkungan sosial-budaya. Kiranya masih perlu

dipertanyakan apakah perempuan iri kepada alat kelamin laki-laki

atau iri kepada hak-hak yang diberikan masyarakat kepada makhluk

yang berjenis kelamin laki-laki.15

Teori fungsionalis struktural yang mendasarkan pandangan

kepada keutuhan masyarakat beranggapan bahwa keterkaitan fungsi

dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur yang

berpengaruh di dalam keutuhan masyarakat. Oleh karena itu,

menurut Talcot Parsons16, salah seorang penggagas teori ini, pem-

bagian peran laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi

dan kompetisi tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan

stabilitas di dalam masyarakat.17 Jadi fungsi dan peran masih didasarkan

kepada jenis kelamin, karena itu, sistem patriarki yang memberikan

peran menonjol kepada laki-laki dianggap suatu hal yang

wajar.

Menarik kiranya untuk diperhatikan penelitian F. Ivan Nye,

sebagaimana dikutip Umar18 yang membagi opini masyarakat

terhadap fungsi dan peran suami isteri kepada lima kelompok, yaitu:

(1) segalanya pada suami; (2) suami melebihi peran isteri; (3) suami

dan isteri mempunyai peran yang sama; (4) peran isteri melebihi

suami; (5) segalanya pada isteri. Apa yang dikatakan Ivan Nye di atas,

selain menunjukkan betapa besar perubahan yang sedang terjadi di

dalam masyarakat juga menunjukkan betapa besar tantangan teori

ini di masa-masa yang akan datang.

Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya

menampilkan diri dengan serba hati-hati, sementara lakilaki

dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara

terbuka. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk melakukan reaksi awal

terhadap perempuan daripada sebaliknya. Ini sejalan dengan yang

dikatakan S.Weitz19 bahwa situasi seperti ini sangat berpengaruh di

, pembagian fungsi dan peran antara suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) dianggap sulit dipertahankan dalam konteks masyarakat modern. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai

persaingan, peran seseorang tidak lagi banyak mengacu kepada norma-norma

kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi

ditentukan oleh daya saing dan keterampilan (*meritokration*). Laki-laki dan

perempuan sama-sama berpeluang memperoleh kesempatan dalam persaingan.

Teori konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas

di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi gender sepenuhnya ditentukan

oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan

merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua

anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan

oleh faktor biologis. Menurut Karl Marx, yang juga mendapat dukungan Friedrich

Engels, relasi gender yang terjadi di dalam masyarakat sepenuhnya merupakan

dalam relasi gender, karena dengan demikian skor laki-laki akan lebih

unggul dalam penentuan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

**3. Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik**

**a. Komunikasi Politik**

Dari sudut penelitian, komunikasi politik telah mengalami

perkembangan yang cukup pesat baik di Amerika maupun di Eropa

Barat20. Begitu pula dalam pembidangannya, komunikasi politik telah

membagi kajian-kajian dalam bidang unsur-unsurnya, apakah itu

komunikator politik, pesan politik, media komunikasi politik, khalayak

politik, sampai pada metode analisis21. Cukup banyak pernyataan para

ahli yang menunjukkan kedekatan komunikasi dengan politik.

Sebagaimana ditulis Nasution22 (1990:23) dengan mengambil

pendapat dari Galnoor (1980) misalnya, mengatakan bahwa “tanpa

komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian

tidak ada politik.” Pernyataan lain datang dari Pye (1963), bahwa:

“…..tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar

rekayasa masyarakat (*social construction*). Teori ini dinilai oleh kalangan penganut

teori fungsionalis struktural terlalu bercorak ekonomi di dalam memberikan

penilaian terhadap kedudukan perempuan

merumuskan komunikasi politik sebagai “hasil yang bersifat politik (*political outcomes*)

dari kelas sosial. “Berbeda halnya dengan Galdnoor (dalam Nasution,

1990:24) menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan infra-struktur politik,

yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang

berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam

peredaran. Rumusan Galdnoor tersebut sejalan dengan pendekatan Almond dan

Powell (dalam Nasution, 1990:24) yang menempatkan komunikasi sebagai suatu

fungsi politik bersama-sama dengan fungsi lainnya (artikulasi, agregasi, sosialisasi,

dan rekrutmen) yang terdapat dalam suatu sistem politik. Bahkan dikemukakan

pula bahwa komunikasi merupakan prasyarat (*prerequisite*) yang diperlukan bagi

berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain tadi.

(*enlarging*) dan melipatgandakan (*magnifying*) ucapan-ucapan dan

pilihan-pilihan individual, maka di situ tidak akan ada suatu politik

yang dapat merentangkan suatu bangsa.”

Michael Rush dan Philip Althoff23 mendefinisikan komunikasi

politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan

diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan

di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Menurut

Maran24 proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup

pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan

kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan. Komunikasi politik

menjadi penting karena merupakan suatu elemen yang dinamis dan

yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Pola-pola

komunikasi politik, komunikasi pengetahuan, nilai-nilai, dan sikapsikap-

yang dikembangkan oleh suatu negara menentukan bentuk

sosialisasi politik yang terjadi di lingkungan yang bersangkutan. Dalam

hal ini komunikasi politik menentukan corak perilaku insan politik.

Dari sudut rujukan ilmiah (*reference*), pemikiran dari analisis

Richard R.Fagen dalam bukunya *Politic and Communication* (1996*),*

Fagen berusaha menggambarkan relevansi bidang kajian ilmu politik

dan komunikasi. Hal tersebut terlihat dari gambaran analisis yang

disajikan, membicarakan peristiwa-persitiwa politik yang berdimensii

komunikasi. Kemudian juga rujukan yang dipergunakan dalam

melihat politik dan komunikasi masih memakai kerangka dasar

(*framework*) dari Harold D.Lasswell (1948), yaitu: *Who says What, in*

*Which Channel, To Whom, With What Effect*.25

Perkembangan lebih jauh dari disiplin ilmu komunikasi politik,

seperti pandangan dari studi mendalam Nimmo (1977), mengungkapkan

sebagai berikut: *Political communication as a field of inquiry*

*which focuses on research and theory building of schulars from*

*many disciplines. The disciplines, over the years, have included mass*

*communication, speech communication, political science, journalism,*

*psyichology, sociology, and other as well.26*. Dari pandangan di atas

terungkap, bahwa disiplin ilmu yang digunakan dalam komunikasi

politik sangat multi disipliner sifatnya, sehingga dalam pengkajian

yang dinamis tentunya membutuhkan paradigma yang luas dari

berbagai disiplin ilmu.

Dari pendekatan yang multi disipliner, walaupun studi ini

dalam kenyataannya hanyalah bersifat interdipliner. Akan tetapi, studi

ini di dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang diamati, ia tidak

hanya menggunakan cara tersendiri, melainkan tetap menggunakan

cara yang lebih sesuai dan mengikuti gejala-gejala yang ada.27

Adanya beberapa penjelasan di atas, tentunya pula bahwa

komunikasi politik dalam melakukan pendekatan selalu berusaha

merumuskan teori atau penelitian yang sesuai dengan fenomenafenomena

yang dihadapinya. Di sisi lain, dengan adanya pendekatan

yang multi disipliner, komunikasi politik akan berkembang secara

dinamis dalam menemukan dirinya sebagai displin ilmu yang

mengalami perkembangan begitu pesat, seiring dengan kemajuan

yang dihadapi dalam lingkungan teori dan dan penelitian.28

Komunikasi politik dalam perkembangannya harus dapat

menjelaskan proses komunikasi yang telah dirumuskan oleh Lasswell

(1948), lebih khususnya lagi disiplin ilmu komunikasi politik dari

berbagai pengkajian literatur secara periodik, buku-buku, dan

literatur yang populer diarahkan kepada: 1). *Political communicator,*

2). *Political massage,* 3). *The media of political communication,* 4).

*The political audience,* 5). *Methods in the study of political.*

Dengan demikian, adanya pembidangan pembahasan

komunikasi politik, sepatutnya juga pengkajian dan penelitian diarahkan

pada arah tersebut, sehingga dalam perkembangan yang dinamis

tidak terlepas dari kerangka proses komunikasi.

Sementara itu, perlu juga kiranya kita memperhatikan konsep

dan gagasan yang dilontarkan A.Muis tentang pengkajian komunikasi

politik supaya tetap tidak kehilangan jati dirinya yang bersifat multi

disipliner, maka komunikasi politik merujuk kepada pesan-pesan

(*massage*) sebagai objek formalnya. Sehingga titik berat konsepnya

terletak pada ilmu komunikasi dan bukan pada ilmu politik. Pada

hakikatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan

tentang politik.29

Penegasan A. Muis tentang komunikasi politik ini adalah

menandakan bahwa simbol-simbol politik akan bermakna apabila

dilihat dari interpretasi makna yang dihasilkan melalui proses

komunikasi. Jadi titik pandang dari interaksi simbol-simbol politik

mengalami proses makna yang dikandung dalam simbol tersebut.

Proses makna tersebut hanya bisa diartikan apabila kita dapat

merumuskannya dalam batasan komunikasi politik.

Ini pula sesungguhnya yang terjadi pada konsep komunikasi

politik dalam kajian ilmu politik yang memberikan batasan ilmu

komunikasi politik. Di antaranya ilmuwan politik Gabriel Almond,

mengungkapkan bahwa komunikasi politik telah dikategorikan

sebagai satu dari empat fungsi *input* dalam sistem politik.30 Lebih

lanjut mereka memakai pendekatan komunikasi politik sebagai

penyebab bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Dari sudut

pandang Almond, tentunya bisa dipahami bahwa komunikasi politik

dilihatnya sebagai penghubung antara satu fungsi dengan fungsi *input*

dalam sistem politik dan hasil dari melaksanakan fungsi tersebut

menghasilkan *output*, dan mereka juga melihatnya untuk bekerjanya

suatu sistem khususnya dalam kriteria *input function* dibutuhkan

berfungsinya komunikasi.

Lebih lanjut, Almond menganalisis komunikasi politik

dititikberatkan pada saluran (medium) dalam merumuskan

komunikasi politik dan tentunya proses input-output dilihat dari

pendekatan sistem, sehingga dalam ilustrasi dan contoh yang

diberikan mereka mengibaratkan komunikasi politik dilihatnya dari

sirkulasi darah yang mengalir dalam tubuh manusia.

Konsep komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi

bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik bagi seorang kandidat

atau kebijaksanaan politik. Begitu juga konsep komunikasi politik

yang ditawarkan Dan Nimmo dalam bukunya *Political Communication*

*and Public Opinion in America* (1978)*,* ia melihat politik, seperti

komunikasi yaitu sebagai suatu proses, dan seperti komunikasi yaitu

sebagai politik yang melibatkan pembicaraan31. Lebih jauh Nimmo

menekankan bahwa komunikasi politik bukan saja pembicaraan

dalam arti sempit seperti kata-kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan

dalam arti yang inklusif, yang meliputi segala cara orang

bertukar simbol, kata-kata yang ditulis dan diucapkan, gambar,

gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Dari uraian Nimmo,

makna konsep yang dapat kita tangkap, bahwa komunikasi politik

berusaha menempatkan (*setting*) maknanya sebagai proses

komunikasi yang terjadi pada setiap interaksi politik. Dan tentunya

pula, Nimmo berusaha menggambarkan secara inklusif bahwa

adanya makna interaksi yang bermuatan politik pada akhirnya

berawal dan berakhir dengan adanya proses komunikasi.

Sementara itu, dalam mengembangkan dan menggunakan

konsep komunikasi dalam ruang lingkup pengaruh dan kekuasaan

untuk menganalisis kerangka rujukan yang sama, maka yang perlu

dipertimbangkan secara proporsional adalah kita berusaha membedakan

subjeknya –apakah itu subjek empirik ataukah normative.

Dua subjek tersebut sukar dibedakan dalam pengkajian selanjutnya,

apakah itu untuk penelitian ataukah untuk pengembangan teori. Jadi,

sukarnya membedakan dua subjek tersebut menyebabkan setiap

proses komunikasi politik (*event-event*) hanya dilihatnya sebagai

realitas politik (dimensi empirik).32 Padahal, sebagai suatu kajian

ilmiah harus didudukkan pada subjek normative, sehingga serangkai-

an peristiwa-peristiwa politik dimensinya tentu juga melibatkan

proses komunikasi yang saling terkait atau kontekstual.

Akan tetapi menurut Hasrullah33, dalam menerima dan

menggeneralisasikan teori-teori dasar politik terhadap komunikasi,

tidak dapat dipungkiri para ilmuwan politik dan komunikasi mempunyai

tingkat kesulitan dalam menempatkan batas-batas dua subjek

tersebut. Sehingga pendekatan yang dapat dilakukan antara ilmu

komunikasi dan ilmu politik, yaitu proses yang dilihatnya adalah

proses komunikasi guna memahami secara utuh.

Di sisi lain, kuatnya pengaruh disiplin ilmu politik dalam perkembangan

komunikasi politk sebagai suatu kajian ilmiah, hal ini

disebabkan pada awalnya untuk menjelaskan peristiwa politik.

Apalagi membicarakan tentang artikulasi politik, kepentingan

kelompok, pemilihan umum, pemilihan presiden, dan mungkin

sampai pada kebebeasan pers. Semua hal tersebut membutuhkan

*interdependensi* antara disiplin ilmu politik dan disiplin ilmu

komunikasi. Yang jelas, formula klasik yang ditawarkan oleh Harold

Lasswell secara jujur kita harus akui masih bernuansa politik, karena

dia adalah ahli di bidang politik.

Oleh karena itu, apabila menyimak konsep koomunikasi politik

yang ditawarkan Dan Nimmo cukup fleksibel dalam memandang

komunikasi politik secara utuh. Dari pemikiran mereka cukup dinamis

dalam melihat konteks pengembangan komunikasi politik terhadap

kemajuan disiplin ilmu sosial khususnya pada disiplin ilmu komunikasi

dan politik. Dan tentunya pula, pemikiran Dan Nimmo yang berdimensi

luas tersebut juga mengisyaratkan bahwa sifat interdisipliner

yang dikembangkan dalam komunikasi politik memungkinkan disiplin

ilmu tersebut tidak terpaku hanya pada dua paradigma (komunikasii

dan politik) yang selalu menjadi perdebatan yang tanpa akhir. Dengan

adanya batasan konsep komunikasi politik dari Dan Nimmo kita perlu

mengkaji dari subjek normative dan empirik sehingga pengembangan

penelitian dan teori dapat mengikuti fenomena-fenomena yang

muncul dalam masyarakaat.

**b. Proses Komunikasi Politik**

Seperti bentuk-bentuk komunikasi yang lain, komunikasi

politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian *pesan-pesan*

tertentu yang berasal dari sumber (selaku pihak yang memprakarsai

komunikasi) kepada *khalayak*, dengan menggunakan media tertentu

untuk mencapai suatu tujuan yang telah tertntu pula. Unsur-unsur

tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan

komunikasi politik dalam suatu masyarakat.34 Sekalipun keluaran (*output*)

komunikasi politik pada akhirnya ditentukan oleh semua unsur

tersebut secara keseluruhan, namun suatu analisis yang tersendiri

terhadap masing-masing unsur perlu juga dilakukan.

Analisis yang dimaksud berguna untuk mengenali lebih jauh

mengenai peran setiap unsur agar pemahaman yang menyeluruh

terhadap proses komunikasi politik dapat dicapai lebih baik.

***c. Komunikator dalam Komunikasi Politik***

Sebagaimana halnya dengan peristiwa komunikasi yang lain,

komunikator yang dimaksud yaitu pihak yang memprakarsai (yang

bertindak sebagai sumber) penyampaian pesan kepada pihak lain.

Komunikator, yang juga disebut *source, encoder, sender,* atau *actor*,

menurut Blake dan Haroldsen,35 mencerminkan pihak yang memulai

dan mengarahkan suatu tindak komunikasi.

Komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan

dalam wujud individu-individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan

beberapa atau banyak orang (kolektif). Dengan begitu, jika seorang

tokoh atau pejabat ataupun rakyat biasa bertindak sebagai sumber

dalam suatu kegiatan komunikasi politik, maka dalam beberapa hal

ia dapat dilihat sebagai sumber individual (*individual source*). Sedang

pada kesempatan yang lain, memang secara jelas dapat dibedakan

bahwa meskipun seseorang individu yang berbicara, tetapi ia

menjurubicarai suatu lembaga atau organisasi, maka pada saat itu

dapat dipandang sebagai *collective source* atau sumber kolektif.36

Perempuan yang berperan aktif dalam partai politik atau pun

lembaga legislatif sesungguhnya memiliki kapasitas sebagai komunikator

politik baik secara individual maupun mewakili lembaga atau

organisasi politik. Dalam peranan ini, perempuan lebih mengupayakan

bentuk partisipasi politik langsung dalam mewujudkan pembangunan

politik.

Menurut pandangan umum, pembangunan politik memang

meliputi kegiatan perluasan partisipasi massa, akan tetapi sangat

perlu membedakan kondisi-kondisi yang memungkinkan adanya

perluasan tersebut. Dari sudut sejarah, di negara-negara barat

dimensi pembangunan politik erat bertalian dengan perluasan hak

pilih dan pengikut sertaan kelompok-kelompok baru dalam

masyarakat di dalam proses politik. Proses partisipasi massa ini berarti

penyebarluasan pengambilan keputusan, di mana partisipasi tersebut

berpengaruh pula terhadap masalah pilihan dan keputusan.37

**d. Pola-Pola Komunikasi Politik**

Komunikasi politik bukanlah suatu bentuk komunikasi yang

spesifik dan terpisah dari model komunikasi sosial. Karena pola

dasarnya yang sama, di mana terjadi pola komunikasi vertikal dan

pola komunikasi horizontal, di samping pola komunikasi formal dan

pola komunikasi informal.

Bagi Maran,38 penting untuk diperhatikan bahwa tanpa

komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan kehilangan

bentuk. Untuk itu sumber pesan, misalnya seorang calon legislatif

dituntut untuk manyampaikan pesan yang jelas kepada para

pendukungnya dan masyarakat luas. Di samping itu, calon yang

bersangkutan pun harus tahu saluran atau sarana penyampaian

informasi yang tepat. Dengan demikian dia pun boleh berharap untuk

memperoleh umpan balik yang tepat pula.

Ditambahkan Maran,39 bagi seorang elit politik, sumber

informasi politiknya meliputi rekan kerjanya di kantor, para pejabat

administratif, sekutu-sekutu politiknya, media massa, kontak-kontak

periodik dengan anggota masyarakat lain, misalnya melalui kegiatan

kampanye pemilihan umum, kunjungan ke berbagai daerah, dan lainlain.

Para pendengarnya terdiri dari berbagai kalangan masyarakat.

**c. Perempuan di dalam Berbagai Organisasi Politik**

Kedudukan perempuan di dalam berbagai organisasi baik

kemasyarakatan maupun politik diperhatikan secara khusus oleh

Rosbeth Moss Kanter’s. Menurutnya, ketimpangan peran gender di

dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai

berbagai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki,

menurut teori fungsionalis struktural, dipersepsikan sebagai kaum yang

lebih unggul, atau berbagai stereotipe gender lainnya, tetapi juga

karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki.

Dalam kendali organisasi menurut Lips, posisi perempuan

lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi

gender masih seringkali terjadi ketimpangan.40

Teori konflik yang mendasarkan pandangannya kepada

pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa

relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya.

Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah

satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua

anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan

ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Karl Marx, yang juga

mendapat dukungan Friedrich Engels, relasi gender yang terjadi di

dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (*social*

*construction*).41 Teori ini dinilai oleh kalangan penganut teori

fungsionalis struktural terlalu bercorak ekonomi di dalam memberikan

penilaian terhadap kedudukan perempuan.

Teori-teori feminis yang lebih prihatin terhadap nasib

perempuan beranggapan bahwa sebenarnya kodrat perempuan tidak

ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh budaya dalam masyarakat.

Ketimpangan peran dan relasi gender dinilai perlu ditinjau kembali,

tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda. Sehingga

muncul berbagai aliran feminis agaknya masih memerlukan

perjuangan panjang karena diantara gagasan-gagasannya ada yang

dinilai kurang realistis, karena dunia politik merupakan bagian dari

dunia publik (*public word*), yang secara umum masih didominasi oleh

laki-laki meminjam istilah Valerie Bryson.42

Sementara itu teori sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi

teori *nature* dan *nurture* beranggapan bahwa faktor biologis

dan faktor sosial budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada

perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yang lebih rumit dianggap

sebagai faktor penghambat untuk mengakses ke dunia publik,

berbeda dengan laki-laki, tidak mengalami hambatan karena faktor

tersebut. Yang menarik dari teori inii karena sesuai dengan hasil

penelitian biogram primat dan hominid yang sering dianggap

sebangsa dengan nenek moyang manusia dalam teori evolusi,

ditemukan fisik dan perilaku antara jantan dan betina mempunyai

perbedaan secara mendasar.

Sementara itu, ideologi gender juga dapat dijelaskan dengan

model pendekatan strukturalisme, seperti yang diterapkan oleh

antropolog Calude Levy Strauss yang berlandaskan pada model

oposisi biner.43 Model ini menempatkan dua kategori secara

bersamaan tapi saling dipertentangkan. Dalam alam pikiran manusia

maupun apa yang ditunjukkan oleh alam telah menjadi sebuah

universalisme dalam interaksi antarmanusia dan manusia dengan

alam. Model pendekatan oposisi biner ini bekerja dengan ‘mengandaikan’

dan mempertentangkan dua entitas yang saling

sberhadapan itu memiliki sifat yang kontradiktif. Dalam hubungan

seperti ini harus ada yang superior dan inferior. Berkaitan dengan

gender, perempuan dihadapkan dengan laki-laki dalam posisi yang

tak setara. Perempuan dinisbatkan sebagai makhluk lemah,

emosional, sebagai pengasuh anak; sedangkan laki-laki ditempatkan

sebagai yang superior, kuat, rasional, dan pencari nafkah, dan seterusnya.

Perjuangan gender dengan demikian berusaha melakukan

penghapusan gaya pendekatan oposisi biner ini. Model oposisi ini,

dalam masyarakat, seperti dikatakan adalah alat untuk menciptakan

maupun untuk menjelaskan mitos-mitos gender.

Di awal perkembangannya, konsep gender diilhami oleh

faham feminis, yaitu suatu kesadaran akan adanya penindasan diri

perempuan sesuai dengan deklarasi Beijing antara lain adalah

perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan perempuan,

perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan,

perempuan dan ekonomi, perempuan dan pengambilan keputusan,

hak asasi wanita, perempuan dan media massa, perempuan dan

lingkungan hidup dan anak perempuan.

Persoalan gender yang mengemuka dalam penelitian ini

adalah fakta yang menunjukkan ketidakberdayaan perempuan untuk

membendung lajunya akses politik dari pihak lain, yaitu laki-laki. Hal

ini dikarenakan, meminjam konsep gender, bahwa telah tercipta

“konstruksi” masyarakat yang menempatkan kaum perempuan

dalam posisi yang lemah, mengalah, dan feminin. Perbedaan gender

telah mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotip yang oleh

masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan

Tuhan. Sifat dan stereotip yang sebetulnya merupakan konstruksi

maupun rekayasa sosial akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural

dalam proses yang panjang.

Posisi perempuan yang mengalami ketidakadilan muncul

dalam berbagai bentuk. *Pertama*, perbedaan gender melahirkan

kekerasan dan penyiksaan terhadap kaum perempuan, baik secara

fisik maupun secara mental. Keragaman bentuk kekerasan terhadap

kaum perempuan terjadi karena perbedaan gender muncul dalam

berbagai bentuk, yaitu yang bersifat fisik seperti perkosaan,

persetubuhan antar anggota keluarga (*incest*), pemukulan,

penyiksaan, bahkan pemotongan alat genital perempuan. Kekerasan

dalam bentuk non-fisik yang sering terjadi misalnya pelecehan

seksual, menyebabkan ketidaknyamanan perempuan secara

emosional. *Kedua*, perbedaan dan pembagian gender dengan

segenap manifestasinya mangakibatkan tersosialisasinya citra posisi,

kodrat dan penerimaan nasib perempuan yang ada. Dengan kata

lain segenap manifestasi ketidakadilan gender itu sendiri juga

merupakan proses kooptasi peran gender perempuan, sehingga

kaum perempuan sendiri menganggap bahwa kondisi dan posisi yang

ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati.

Keterpurukan posisi perempuan yang diderita oleh perempuan

dalam pengambilan peran publik adalah sebagai akibat dari

perbedaan gender yang sudah mengakar dalam sosio-kultural masyarakat.

Perlakuan yang menempatkan perempuan dengan tugas

domestik telah menjadikan perempuan tidak memiliki keahlian,

sumber daya dan akses yang lebih dibanding laki-laki. Lebih jauh,

keterpurukan dan ketimpangan gender dalam tesis ini, akan lebih

meyakinkan bila dipakai konsep marjinalisasi perempuan yang

berbasis gender. Marjinalisasi, menurut Scott,44 adalah proses

penyingkiran atau proses pemiskinan secara ekonomi. Proses

marjinalisasi mengakibatkan kemiskinan, dalam hal ini pemiskinan

terhadap kaum perempuan yang disebabkan gender. Masih menurut

Scott, bahwa bentuk-bentuk marjinalisasi itu antara lain :

1) Sebagai proses pengucilan *(expulsion)*

2) Sebagai proses penggeseran perempuan ke pinggiran

*(marginilization)* dari pasar tenaga kerja

3) Sebagai proses feminisasi atau segregasi

4) Sebagai proses ketimpangan ekonomi yang makin meningkat.

Marjinalisasi perempuan yang dialami kaum perempuan

diberbagai daerah ditunjukkan dengan tidak adanya pilihan pekerjaan

yang lebih baik, dari segi ekonomi maupun sosio-kultural yang dapat

dipilih mereka. Dengan demikian, perempuan tersebut terpinggirkan

, *Senjatanya Orang-orang Kalah*

karena tidak adanya pekerjaan alternatif. Secara ringkas, marjinalisasi

telah meminggirkan perempuan dalam bidang jasa, profesi dan

ekonomi. Akibatnya, perempuan mengalami kesulitan dalam

memperbaiki perekonomian mereka. Karenanya, mereka tetap

‘berkubang’ dengan kemiskinan.

Menurut Fakih,45 bentuk marginalisasi kaum perempuan tidak

saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga,

masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap

perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk

diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan.

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi

terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional

atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin

sebuah partai atau menjadi manager bahkan tidak boleh membuat

keputusan, berakibat munculnya sikap yang menempatkan

perempuan pada posisi yang tidak penting.46

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala

macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu

ke waktu. Praktek seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran

gender yang tidak adil.

Asumsi-asumsi tersebut menegaskan adanya dominasi kaum

laki-laki terhadap kaum perempuan yang seolah tidak terbatas

zaman. Hal tersebut tampak dalam praktek interaksi sosial termasuk

interaksi di kalangan politisi. Interaksi simbolik kalangan politisi

sebagai profesi yang hampir seluruhnya dilakukan oleh kaum lakilaki

erat kaitannya dengan masalah perbedaan jenis kelamin. Laurie

P.Arliss seperti dikutip Alo Liliweri,47 mengatakan bahwa perbedaan

jenis kelamin itu berkaitan erat dengan relasi antar pribadi dan

lingkungan profesional. Dalam kenyataannya, antara laki-laki dan

perempuan berlaku perbedaan praktik tentang stereotip.

Selain dalam bentuk praktik yang berhubungan dengan

stereotip dan perilaku, masalah gender juga dilihat dari penggunaan

alat, bahan, ukuran, maupun pekerjaan yang secara turun-temurun

dibedakan antara laki-laki dan perempuan seperti dikatakan Illich,48

bahwa “Tiap orang berhubungan dengan masyarakat lewat tindakantindakan,

sementara alat-alat digunakan secara efektif untuk

menjalankan tindakan-tindakan itu. Gender disimpulkan dari alatalat,

bentuk-bentuk, bahan, ukuran dan pekerjaan”.

Masih berkisar pada pengertian patriarki, Sylvia dalam

bukunya *Theorising Patriarchy*, menyebut patriarki sebagai suatu

sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum

laki-laki menguasai, menindas dan mengisap perempuan.

Dalam sistem ini melekat ideologi yang menyatakan laki-laki

lebih tinggi dari perempuan dan perempuan harus dikontrol oleh

laki-laki, dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Pengertian

patriarki berarti dominasi laki-laki. Namun, apabila diresapi lebih

lanjut ternyata terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam

meninjau patriarki, titik berat pandangan lebih kepada persoalan

hirarki dalam semua sektor kehidupan. Sementara dominasi laki-laki

*(male dominance)* lebih mengacu kepada persinggungan dan

hubungan antar laki-laki dan perempuan yang terpengaruh oleh

emosi.

Pemahaman ini memang bias dan mengetengahkan ketidakberimbangnya

kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Patriarki

lebih merambah kepada kondisi-kondisi yang hirarki, sementara

dominasi laki-laki lebih merambah hubungan spesifik antara laki-laki

dan perempuan. Mengikuti Goldhaber49 dalam teorinya bahwa

patriarki adalah salah satu bentuk dominasi laki-laki atas perempuan,

hubungan politik yang dilandasi oleh ketidakberdayaan perempuan

menunjukkan adanya permasalahan tersendiri yang ditimbulkan

patriarki.

**C. Keterwakilan Perempuan dalam Politik**

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga

perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar.

Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi

keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di

antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu

kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak,

serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan

melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang

tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa

perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam

kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan,

seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite

sekolah, dan kelompok pengajian.

Argumen tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal

dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam

kehidupan sosial kemasyarakatan, argumen tersebut juga

menunjukkan perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan

relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan

dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses

kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Bila dicermati lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam

politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak

dikeluarkannya UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang

menyebutkan pentingnya aksi affirmasi (*affirmative action*) bagi

partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari

seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat nasional maupun

lokal. Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami kenaikan

dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. Diawali dengan keputusan

Negara mengenai perpolitikan diNegeri ini, tepatnya pada tanggal 4

Januari 2008 dengan di undang-undangkannya Lembaran Negara

No.2 tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan

didalam partai politik, berbagai hal diatur didalam undang-undang

ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemilu yang

memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik formal yaitu: UU

Pemilu No.10 tahun 2008 pada pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan

125

bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi

persyaratan dan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Selain

itu, Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar

bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Lebih jauh, Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 juga menyebutkan

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan

persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol

pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara

di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan

pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga

tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan

perempuan paling rendah 30%.

Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali

pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para

aktivis perempuan. Hasilnya adalah 62 perempuan saat itu terpilih

dari 550 anggota DPR RI (11,3%). Sementara itu, dalam Pemilu 1999,

pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 perempuan dari 500

anggota DPR yang terpilih (9%).

Dengan demikian, meskipun telah ada peraturan

perundangan yang memandatkan kuota 30% dalam parlemen, itu

tidak serta-merta menjamin peningkatan keterwakilan perempuan

dalam politik. Selain itu, dalam kenyataannya pun, pemenuhan kuota

tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun ketentuan yang

ada sifatnya mensyaratkan, itu hanya disertai sanksi moral dan bukan

sanksi yang tegas yang dapat mendesak pemenuhan kuota itu.

Walaupun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di

bidang politik, khususnya menjadi calon anggota legislatif tetapi tetap

saja kesempatan tersebut bergantung pada kepemimpinan partai

politik dimana peran partai politik sangat penting dalam menentukan

apakah perempuan bisa duduk di lembaga legislatif. Para perempuan

yang berada di parpol dan dinominasikan sebagai caleg oleh partainya

menyebutkan hambatan yang mereka rasakan antara lain adalah

kriteria sangat maskulin yang diterapkan, tidak ada kriteria yang

memasukkan kerja khas perempuan yang artinya kekuasaan dominan

ada di tangan laki-laki yang lebih di utamakan untuk menjadi anggota

legislatif, dimana perempuan biasanya hanya di jadikan sebagai

pelengkap persyaratan dan sekedar memenuhi Undang-Undang

(Sistem kuota), jarang sekali sebuah parpol benar-benar mengusung

perempuan dengan menempatkan perempuan pada nomor urut satu

peserta pencalegkan dan yang paling banyak dikemukakan adalah

politik uang, yaitu besarnya sumbangan uang yang diberikan kepada

partai, sementara partai tidak transparan menyebut berapa

sumbangan yang diharapkan dari seorang caleg.

Sebagaimana pada Undang-undang sebelumnya, yakni UU

No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang dinilai belum optimal

dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai untuk

memunculkan calon politisi yang mampu berperan di kehidupan

berbangsa dan bernegara, serta mampu mewujudkan partai politik

sebagai organisasi yang bersifat Nasional dan modern , sehingga UU

No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbaharui

mengingat tuntutan masyarakat dan tuntutan bagi kaum perempuan

dan anak yang masih terdiskriminasi selama ini. Olehnya itu, perlu

di akomodasi kaum perempuan di Lembaga Legislatif, karena

perempuan lebih mengerti akan kebutuhan dari kaum perempuan

dan anak itu sendiri.

Kampanye kuota adalah bentuk perjuangan politik lanjutan

perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad

20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi,

perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan

dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah

takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud

keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.

Keterwakilan perempuan dari periode ke periode mengalami

peningkatan, dan bahkan apabila kita melihat perkembangan dari

periode 1999-2004 s.d 2009-2014 kenaikannya cukup signifikan yaitu

9 persen meningkat menjadi 17,7 persen. Namun capaian

keterwakilan perempuan pada masing-masing provinsi masih

bervariasi jumlahnya, terdapat beberapa provinsi yang tidak ada

keterwakilan perempuan, seperti provinsi Lampung, Kalimantan

Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Aceh.

Sementara keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) pencapaiannya sedikit lebih baik dibanding dengan

keterwakilan perempuan di DPR. Keterwakilan perempuan di DPD

menurut hasil pemilu tahun 2004 sebesar 19,8 persen dan meningkat

menjadi 22,7 persen pada pemilu 2009. Namun demikian capaian

ini tidak diikuti oleh semua provinsi, seperti pada provinsi Bali dan

Provinsi Gorontalo pada pelaksanaan pemilu 2009 keterwakilan

perempuan di DPD tidak ada. Sementara terdapat 2 provinsi yang

mencapai 37 persen yaitu provinsi Irianjaya Barat dan Kepulauan

Riau.

**D. Penutup**

Untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan dan

ketidaksetaraan dalam bidang politik antara perempuan dengan lakilaki,

dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis,

partisipasi dan kontrol.

Komunikasi politik yang dimainkan perempuan-perempuan

melalui berbagai macam saluran baik dengan menyampaikan pesanpesan

politik dengan aktif di berbagai sistem politik, seperti partai

politik, legislatif, organisasi masyarakat dan lainnya. Sebagai

komunikator politik, perempuan tidak banyak yang terlibat dalam

struktur organisasi partai politik atau pun menjadi anggota legislatif.

Selanjutnya tipologi komunikator politik perempuan, bisa

diklasifikasikan menjadi perempuan sebagai politisi, perempuan

sebagai komunikator profesional, dan perempuan sebagai aktivis.

Perlu pula ditegaskan bahwa peningkatan peran perempuan

dalam komunikasi politik jangan hanya dilihat dari peningkatan

jumlah perempuan yang aktif dalam kepengurusan organisasi partai

politik ataupun terpilih sebagai anggota legislatif, tetapi juga harus

dinilai dari meningkatnya keefektifan dan dampak nyata yang mereka

hasilkan, yang bisa dinilai dari cara perempuan menciptakan berbagai

perubahan dalam tata peraturan kelembagaan, norma-norma dan

praktik dan kepantasan serta meningkatnya hak-hak bagi sesama

perempuan untuk meretas ketidakadilan gender serta meningkatkan

taraf hidup perempuan pada umumnya.

128

*Mohammad Zamroni, Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*

*Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013*

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku-Buku

Anugrah, Asrid. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta:

Pancuran Alam. 2009.

Arief Budiman. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: Gramedia.

1982.

Afan Gaffar. 1983. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Rajawali Press. (Saduran)

No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries.

Samuel P. Huntington. Cambridge, Mass: Harvard University

Press, 1977.

Alo Liliweri. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*.

Yogyakarta: LkiS. 2002.

Anderson, M. L. *Thinking About Women: Sosiological and Feminist*

*Perspectives.* New York: Macmillan Publishers. 1983.

Arbi Sabit. *Perwakilan Politik di Indonesia.* Jakarta: CV.Rajawali. 1985.

Ali Engginer, Ashghar. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta:

LSPPA. 2000.

Beilharz, Peter. *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2003.

Budiardjo, M. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia. 1982.

Cross, Marry. “The selling of Gender Identity”. Dalam *Advertising*

*and Culture, Theoritical Perspectives* (eds.Mary Cross).

Pregager, Westport, Connecticul, London. 1986.

Cohen, J. M. & Uphoff. *Rural Development Participation Inhance*. New

York: Cornel University. 1977.

Dahl, Robert. *Analisa Politik Modern.* (terj. Sahat Simamora), Jakarta:

Bumi Aksara. 1985.

Duvergeer, Maurice. *Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada. 1998.

Engels, F. *The Origins of The Famil, Private Property and The State*.

New York: International Publishers. 1972.

Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. 1996.

129

*Mohammad Zamroni, Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*

*Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013*

Goldhaber, Gerald M. *Organizational Communication*. WCB Publisher,

Dubuque, Lowa, Fifth Edition. 1990.

Handayani, Trisakti & Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*.

Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. 2002.

Hasrullah. *Megawati dalam Tangkapan Pers*. Yogyakarta: LKiS. 2001.

Hafidz, Wardah et.al., *Tenaga Pendamping Lapangan Perempuan:*

*Peran Strategis Namun Marginal.* Jakarta: PPSW. 1995.

Illich, Ivan. *Matinya Gender.* Edisi Indonesia. Alih Bahasa Omi Intan

Naomi, Jakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Kincaid, D. Lawrence and Wilbrum Schramm. *Asas-Asas Komunikasi*

*Antar Manusia.* eds. Ketujuh, (diterjemahkan oleh Agus

Setiadi), Hawaii: West Communication Institute. 1987.

Kamla Bhasin. *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan*

*Dominan Terhadap Kaum Perempuan.* Yogyakarta: Yayasan

Bentang Budaya. 1996.

Kowani. *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka. 1978.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: PT Penerbitan

Universitas. 1990.

Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication (Sixth Edition).*

Wadsworth, Albuquerque, New Mexico. 1999.

Lubis, T.Mulya., *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi*

*di Indonesia.* Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam

Budiardjo, Dalam Munandar H. (Penyt.). Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama. 1994.

Lavenduski, Joni dan Azza Karam. 1999. “Perempuan di Parlemen:

Membuat Suatu Perubahan”, dalam Karam, Azza, *et.all.* (ed.).

*Perempuan di parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan*

*Sekedar Hiasan.* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Diterjemahkan oleh Arya Wisesa dan Widjanarko dari *Women*

*in Parliament: Beyond Number.* IDEA. 1998.

Maran, Rafael R. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

2001.

130

*Mohammad Zamroni, Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*

*Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013*

Muhadjir, Darwin dan Tukiran. *Menggugat Patriarki.* Yogyakarta: Ford

Foundation Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.

2001.

Mas’oed, M. dan MacAndrew C. *Perbandingan Sistem Politik*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1978.

Megawangi, R. *Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender.* Bandung

: Mizan. 1999.

Mosse, J. Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar. 1995.

Murniati A, Prasetyo N. “Perempuan Indonesia dan Pola

Ketergantungan”. Dalam Budi Santoso, Sud S, Sudiarja*,*

Prapadiharja dan Pratiwi R (ed). *Citra Wanita dan Kekuasaan*

*(Jawa)*. Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino. l992.

Nimmo, Dan. 1978. “Political Communication and Public Opinion in

America”. Dalam *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*.

(terj.Tjun Surjaman), Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.

Nasution, Zulkarimein. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar.* Jakarta:

Ghalia Indonesia. 1990.

Nawal L. Saadawi. *Perempuan dalam Budaya Patriarki.* Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. 2001.

Nazaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur’an*.

Jakarta: Paramadina. 1999.

Notosusanto S. “Perempuan dan Politik Internasional”. Dalam

Notosusanto dan E Kristi Purwandari (Penyunting),

*Perempuan dan Pemberdayaan.* Jakarta: Program Studi Kajian

Wanita VI. 1997.

Rich, Andrienne. *Syimbolic Interaction and Etnography Research*. New

York: State University of New York. 1976.

Robbins, James G. & Barbara S. Jones. *Effective Communication for*

*Today’s Manager*. Terj. R.Turman Sirait, Jakarta: CV.Tulus Jaya.

1982.

Sumarno. *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: PT.Citra

Aditya Bakti. 1989.

131

*Mohammad Zamroni, Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*

*Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013*

Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang

Press. 1995.

Soetjipto AW. “Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik”.

Dalam Smita Notosusanto dan Purwandari EK (Peny).

*Perempunan Pemberdayaan.* Jakarta: Program Studi Kajian

Wanita UI. 1997.

Surbakti AR. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Surabaya: Airlangga University

Press. l984.

Usman S. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. 1998.

Waters, Judith & George Ellis. “The selling of Gender Identity”. Dalam

buku *Advertising and Culture, Theoritical Perspectives*. editor,

Mary Cross, Penerbit Peager, Wesport, Conectitute London.

1996.

B. Jurnal Ilmiah

Asfar, M. *Wanita dan Politik Antara Karir dan Jabatan Suami*. Prisma,

1996.No. 5 Tahun XXV Mei.

Affan Gaffar. *Partisipasi Politik*. Prospektif: 1991.*No. I, Vol. 3.*

Nursyahbani Katcasungkana. *Domestifikasi Perempuan dalam Karir.*

Pesantren, 1989***.***Vol. VI, No. 2.

Susanto, Astrid S., *Peranan Komunikasi dalam Perusahaan dan*

*Organisasi.* Majalah Manajemen, 1983.No. 15 Tahun III, Edisi

Maret-April.

Tan, Mely G. *Keadaan dan Hari Depan Perempuan sebagai Sumber*

*Daya Manusiawi*. Masyarakat Indonesia*,* 1983.Vol. X.

C. Laporan Penelitian dan Makalah

CETRO (*Centre for Electoral Reform*). *Data dan Fakta Keterwakilan*

*Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif*

*1999-2001.* (Ringkasan Eksekutif), Jakarta: Divisi Perempuan

dan Pemilu, 8 Maret (tidak diterbitkan). 2002.

Raharjo. “Konsepsi Pembangunan Politik: Perspektif Gender”.

Makalah Seminar Nasional: *Peran Wanita Dalam*

*Pembangunan Sosial Budaya Polilik Bangsa.* Yogyakarta: Biro

Wanita DPD Golkar Tk.I. Propinsi DIY. 1995.

132

*Mohammad Zamroni, Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*

*Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013*